Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Samarinda, 7 Mei 2026

Kepala Balai Besar

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.

NIP. 197004241994031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Pernyataan Tanggung Jawab v
Ringkasan Laporan 6
I Laporan Realisasi Anggaran 8
II Neraca 9
III Laporan Operasional 10
IV Laporan Perubahan Ekuitas 11
V Catatan Atas Laporan Keuangan 12
A. Penjelasan Umum 12
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis 12
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 13
A.3 Basis Akuntansi 13
A.4 Dasar Pengukuran 13
A.5 Kebijakan Akuntansi 13
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 17
B.1 Pendapatan 17
B.1.2 Penerimaan Pajak 17
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak 18
B.2 Belanja 18
B.2.1 Belanja Pegawai 19
B.2.2 Belanja Barang 19
B.2.3 Belanja Modal 20
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial 21
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran 21
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 22
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 22
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas 22
C.3 Piutang Bukan Pajak 22
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 22
C.5 Persediaan 23
C.6 Tanah 23
C.7 Peralatan dan Mesin 23
C.8 Gedung dan Bangunan 23
C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan 24
C.10 Aset Tetap Lainnya 24
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24
C.12 Aset Tak Berwujud 24
C.13 Aset Lain-lain 25
C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 25
C.15 Utang kepada Pihak Ketiga 25
C.16 Utang Yang Belum Ditagihkan 25
C.17 Hibah Yang Belum Disahkan 26
C.18 Uang Muka dari KPPN 26
C.19 Ekuitas 26
C.20 Catatan Penting Lainnya Neraca 26
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 27
D.1 Pendapatan Perpajakan 27
D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak 27
D.3 Beban Pegawai 27
D.4 Beban Persediaan 28
D.5 Beban Barang dan Jasa 28
D.6 Beban Pemeliharaan 29
D.7 Beban Perjalanan Dinas 29
D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat 29

D.9 Beban Bantuan Sosial 29
D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi 30
D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30
D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar 30
D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 31
D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya 31
D.15 Pos Luar Biasa 31
D.16 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional 31
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 32
E.1 Ekuitas Awal 32
E.2 Surplus (Defisit) LO 32
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 32
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 32
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset 32
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan 32
E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi 32
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset 32
E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 33
E.4.6 Koreksi Lain-lain 33
E.5 Transaksi Antar Entitas 33
E.6 Ekuitas Akhir 33
E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas 33
F. Pengungkapan Penting Lainnya 34
F.1 Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca 34
F.2 Pengungkapan Lain-lain 34
VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Samarinda, 7 Mei 2026
Kepala Balai Besar



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

   Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp363.805.073 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp363.805.073 atau mencapai 127,32 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp285.735.000.

   Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.269.833.323 atau mencapai 94,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.850.530.000.

2. **NERACA**

   Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.786.688.921 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp276.982.800; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp65.509.706.121 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

   Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19.378.649 dan Rp65.767.310.272

3. **LAPORAN OPERASIONAL**

   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

   Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp323.841.773 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.396.046.136 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-10.072.204.363, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp408.374.300 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.663.830.063.

4. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

   Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp66.524.096.085, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-9.663.830.063 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 150.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 8.906.894.250 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp65.767.310.272

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	285.735.000	363.805.073	127,32	170.176.200
JUMLAH PENDAPATAN		**285.735.000**	**363.805.073**	**127,32**	**170.176.200**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.873.736.000	5.103.910.483	104,72	5.046.728.116
Belanja Barang	B.2.2	4.800.825.000	3.990.025.279	83,11	3.928.223.065
Belanja Modal	B.2.3	175.969.000	175.897.561	99,96	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**9.850.530.000**	**9.269.833.323**	**94,10**	**8.974.951.181**

Samarinda, 7 Mei 2026
Kepala Balai Besar

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	526.800	39.645.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	-	(198.225)
Persediaan	C.5	276.456.000	135.669.000
Jumlah Aset Lancar		**276.982.800**	**175.115.775**
ASET TETAP			
Tanah	C.6	51.756.480.060	51.756.480.060
Peralatan dan Mesin	C.7	13.423.606.076	13.247.708.515
Gedung dan Bangunan	C.8	14.552.336.000	14.552.336.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	2.189.918.000	2.189.918.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	108.221.298	108.221.298
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(16.520.855.313)	(15.482.272.773)
Jumlah Aset Tetap		**65.509.706.121**	**66.372.391.100**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	11.673.578	11.673.578
Aset Lain-lain	C.13	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(11.673.578)	(11.673.578)
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**65.786.688.921**	**66.547.506.875**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	19.378.649	23.410.790
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.16	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.17	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**19.378.649**	**23.410.790**
JUMLAH KEWAJIBAN		**19.378.649**	**23.410.790**
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	65.767.310.272	66.524.096.085
JUMLAH EKUTAS		**65.767.310.272**	**66.524.096.085**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**65.786.688.921**	**66.547.506.875**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	323.841.773	127.456.200
Jumlah Pendapatan		**323.841.773**	**127.456.200**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	5.098.924.683	5.049.470.116
Beban Persediaan	D.4	9.810.000	43.950.000
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.815.695.507	2.617.279.928
Beban Pemeliharaan	D.6	517.982.160	477.554.371
Beban Perjalanan Dinas	D.7	646.964.471	495.629.865
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	268.285.000	332.231.000
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1.038.582.540	1.116.053.797
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	(198.225)	198.225
Jumlah Beban		**10.396.046.136**	**10.132.367.302**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(10.072.204.363)**	**(10.004.911.102)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	408.374.300	463.365.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**408.374.300**	**463.365.000**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(9.663.830.063)**	**(9.541.546.102)**
Pos Luar Biasa	D.15		
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(9.663.830.063)**	**(9.541.546.102)**

Samarinda, 7 Mei 2026
Kepala Balai Besar



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**66.524.096.085**	**67.134.511.146**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(9.663.830.063)**	**(9.541.546.102)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**150.000**	**(117.842.000)**
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	150.000	1.158.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	(119.000.000)
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		**150.000**	**(117.842.000)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	8.906.894.250	9.048.973.041
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(756.785.813)	(610.415.061)
EKUITAS AKHIR	E.6	**65.767.310.272**	**66.524.096.085**

Samarinda, 7 Mei 2026
Kepala Balai Besar

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah lembaga baru di Kementerian Pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, untuk mendorong transformasi sektor pertanian melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi. BRMP menggantikan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam beberapa aspek terkait dengan perakitan dan modernisasi pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur berlokasi di Jalan PM Noor Sempaja Samarinda. BRMP Kaltim didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BRMP Kaltim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek
  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang
  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	285.735.000	285.735.000
Jumlah Pendapatan	**285.735.000**	**285.735.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	4.736.343.000	4.873.736.000
Belanja Barang	2.397.765.000	4.800.825.000
Belanja Modal	187.607.000	175.969.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**7.321.715.000**	**9.850.530.000**

Realisasi Pendapatan Rp363.805.073

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp363.805.073 atau mencapai 127,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp285.735.000. Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp363.805.073. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya setoran hasil penjualan benih Padi hasil kegiatan Produksi Benih Sumber Padi TA 2025 dan setoran penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berupa tunjangan fungsional Peneliti dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	285.735.000	363.805.073	127,32
Jumlah	**285.735.000**	**363.805.073**	**127,32**

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 113,78 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	363.805.073	170.176.200	113,78
Jumlah	**363.805.073**	**170.176.200**	**113,78**

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp363.805.073

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan

2024 adalah masing- masing sebesar Rp363.805.073 dan Rp170.176.200. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 113,78 dari TA 2024 dikarenakan adanya setoran hasil penjualan benih Padi hasil kegiatan Produksi Benih Sumber Padi TA 2025 dan setoran penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berupa tunjangan fungsional Peneliti. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	363.805.073	170.176.200	113,78
Jumlah	**363.805.073**	**170.176.200**	**113,78**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	158.581.300	18.049.200	778,61
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.848.000	21.692.000	(91,48)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	26.393.473	2.000.000	1.219,67
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	137.019.000	85.715.000	59,85
Jumlah	**363.805.073**	**170.176.200**	**113,78**

Realisasi Belanja Rp9.269.833.323

B.2 Belanja

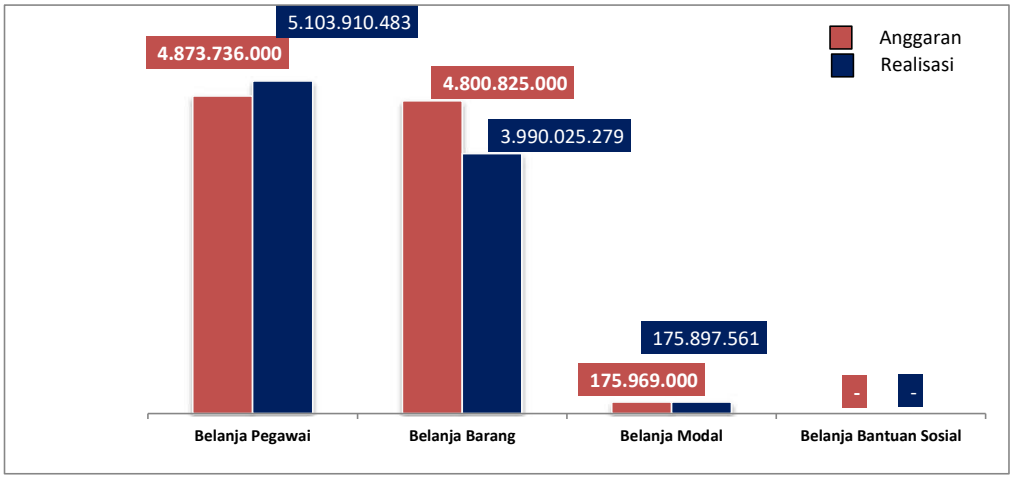
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp9.269.833.323 atau 94,10 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.850.530.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.873.736.000	5.103.910.483	104,72
Belanja Barang	4.800.825.000	3.990.025.279	83,11
Belanja Modal	175.969.000	175.897.561	99,96
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**9.850.530.000**	**9.269.833.323**	**94,10**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,29% dikarenakan adanya penambahan pegawai baru CPNS dan PPPK, penambahan belanja modal serta penambahan kegiatan pendampingan strategus Kementan dan Produksi Benih Sumber Padi. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	5.103.910.483	5.046.728.116	1,13

Belanja Barang	3.990.025.279	3.928.223.065	1,57
Belanja Modal	175.897.561	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**9.269.833.323**	**8.974.951.181**	**3,29**

Realisasi Belanja Pegawai Rp5.103.910.483

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.103.910.483 dan Rp5.046.728.116. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,13 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya penambahan pegawai baru CPNS dan PPPK serta kenaikan pangkat reguler dan fungsional

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.415.056.480	3.419.907.700	(0,14)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	211.421.092	218.364.150	(3,18)
Belanja Tunj. Anak PNS	51.578.169	55.871.338	(7,68)
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	381.850.000	315.550.000	21,01
Belanja Tunj. PPh PNS	32.602.601	30.957.081	5,32
Belanja Tunj. Beras PNS	157.803.180	160.482.720	(1,67)
Belanja Uang Makan PNS	504.926.000	496.428.000	1,71
Belanja Tunjangan Umum PNS	51.860.000	75.415.000	(31,23)
Belanja Uang Lembur	34.947.000	81.955.000	(57,36)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.814	57.837	(17,33)
Jumlah Belanja kotor	**5.104.650.658**	**5.053.550.120**	**1,01**
Pengembalian Belanja Pegawai	740.175	6.822.004	(89,15)
Jumlah Belanja	**5.103.910.483**	**5.046.728.116**	**1,13**

Realisasi Belanja Barang Rp3.990.025.279

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.990.025.279 dan Rp3.928.223.065. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,57% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan pendampingan strategus Kementan dan Produksi Benih Sumber Padi

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	1.240.050.649	1.191.911.201	4,04
Belanja Barang Non Operasional	1.172.157.946	1.183.224.952	(0,94)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.810.000	336.726.000	(97,09)
Belanja Jasa	404.998.343	243.176.676	66,54
Belanja Pemeliharaan	516.043.870	477.554.371	8,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	646.964.471	495.629.865	30,53
Jumlah Belanja Kotor	**3.990.025.279**	**3.928.223.065**	**1,57**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**3.990.025.279**	**3.928.223.065**	**1,57**

Realisasi Belanja Modal Rp175.897.561

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp175.897.561 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024

disebabkan oleh dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan laboratorium

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.897.561	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**175.897.561**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**175.897.561**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp175.897.561

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp175.897.561 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan laboratorium dan AC untuk ruang UPBS.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.897.561	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**175.897.561**	**-**	**-**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**175.897.561**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Piutang Bukan Pajak Rp526.800

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp526.800 dan Rp39.645.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	526.800	39.645.000
Jumlah	**526.800**	**39.645.000**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp198.225. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	29.475.000	0.5%	147.375
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**29.475.000**		**147.375**

Persediaan Rp276.156.000

C.5 Persediaan

Rp276.456.000

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp276.456.000 dan Rp135.669.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	276.456.000	135.669.000
Jumlah	**276.456.000**	**135.669.000**

Persediaan tersebut di atas dalam Merupakan persediaan benih Padi dan Jagung yang ada di Gudang UPBS BRMP Kalimantan Timur dengan kondisi baik.

Tanah
Rp51.756.480.060

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp51.756.480.060 dan Rp51.756.480.060. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**51.756.480.060**
Mutasi tambah :	
Hibah (Masuk)	
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**51.756.480.060**

Peralatan dan Mesin
Rp13.423.606.076

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp13.423.606.076 dan Rp13.247.708.515. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**13.247.708.515**
Mutasi tambah:	
	-
Pembelian	175.897.550
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**13.423.606.065**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(12.422.760.417)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**1.000.845.648**

Gedung dan Bangunan
Rp14.552.336.000

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.552.336.000 dan Rp14.552.336.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**14.552.336.000**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**14.552.336.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.467.517.481)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**11.084.818.519**

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp2.189.918.000

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.2.189.918.000 dan Rp.2.189.918.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**2.189.918.000**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**2.189.918.000**
Akumulasi Penyusutan s.d.	(630.577.415)
Nilai Buku per	**1.559.340.585**

Aset Tetap Lainnya Rp108.221.298

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.108.221.298 dan Rp.108.221.298. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**108.221.298**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**108.221.298**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**108.221.298**

Aset tetap lainnya senilai Rp108.221.298 berupa Monografi, Buku Lainnya, Audio Visual Lainnya, Peta (Map), Maket dan Foto Dokumen Lainnya dan Sapi Potong

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp16.520.855.313

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp16.520.855.313 dan Rp15.482.272.773. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.423.606.076	(12.422.760.417)	1.000.845.659
2	Gedung dan Bangunan	14.552.336.000	(3.467.517.481)	11.084.818.519
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.189.918.000	(630.577.415)	1.559.340.585
4	Aset Tetap Lainnya	108.221.298	-	108.221.298
Akumulasi Penyusutan		**30.274.081.374**	**(16.520.855.313)**	**13.753.226.061**

Aset Tak Berwujud Rp11.673.578

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp11.673.578 dan Rp11.673.578. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur berupa Software.
Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**11.673.578**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**11.673.578**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(11.673.578)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Aset Lain-lain Rp0

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 11.673.578

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp11.673.578 dan Rp11.673.578. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	11.673.578	(11.673.578)	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	**11.673.578**	**(11.673.578)**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp19.378.649

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.378.649 dan Rp23.410.790. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	4.459.000
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	19.378.649	18.951.790
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
Total	**19.378.649**	**23.410.790**

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.16 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.17 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
	-
Jumlah	**-**

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Ekuitas Rp65.767.310.272

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.767.310.272. dan Rp66.524.096.085. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 18 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp323.841.773

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp323.841.773 dan Rp127.456.200. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 154,08. Hal tersebut disebabkan oleh dikarenakan adanya peningkatan setoran hasil penjualan benih Padi hasil kegiatan Produksi Benih Sumber Padi TA 2025 dan pengujian Laboratorium . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	158.581.300,00	18.049.200,00	778,61
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.848.000,00	21.692.000,00	(91,48)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	26.393.473,00	2.000.000,00	1.219,67
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	137.019.000,00	85.715.000,00	59,85
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	-	-
Jumlah	**323.841.773,00**	**127.456.200,00**	**154,08**

Nilai pendapatan di LO senilai Rp323.841.773,00 sedangkan nilai pendapatan di LRA senilai Rp363.805.073,00, atau terdapat perbedaaan senilai Rp39.963.300,00 , berupa pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan fungsional peneliti Rp 39.645.000,00 dan pengembalian uang makan PNS

Beban Pegawai Rp5.098.924.683

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.098.924.683 dan Rp5.049.470.116.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,98 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh dikarenakan adanya penambahan pegawai baru CPNS dan PPPK. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.415.056.480,00	3.419.907.700,00	(0,14)
Beban Pembulatan Gaji PNS	47.639,00	55.833,00	(14,68)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	211.421.092,00	218.364.150,00	(3,18)
Beban Tunj. Anak PNS	51.578.169,00	55.871.338,00	(7,68)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-

Beban Tunj. Fungsional PNS	381.350.000,00	314.755.000,00	21,16
Beban Tunj. PPh PNS	32.602.601,00	30.957.081,00	5,32
Beban Tunj. Beras PNS	157.803.180,00	160.482.720,00	(1,67)
Beban Uang Makan PNS	504.399.200,00	496.428.000,00	1,61
Beban Tunjangan Umum PNS	51.120.000,00	69.890.000,00	(26,86)
Beban Uang Lembur	34.947.000,00	81.955.000,00	(57,36)
Jumlah	**5.098.924.683,00**	**5.049.470.116,00**	**0,98**

Beban Pegawai senilai Rp5.099.451.483,00 tidak sesuai dengan Belanja Pegawai senilai Rp5.103.910.483,00 terdapat selisih senilai Rp4.459.000,00 berupa Jurnal akrual/balik atas Beban Uang Makan PPPK yang masih harus dibayar senilai Rp3.959.000 dan Beban Tunjangan Fungsional pegawai PNS yang masih harus dibayar senilai Rp500.000,00

Beban Persediaan Rp9.810.000

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.810.000 dan Rp43.950.000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 77,68 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh -. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	9.810.000,00	43.950.000,00	(77,68)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**9.810.000,00**	**43.950.000,00**	**(77,68)**

Beban Barang dan Jasa Rp2.815.695.507

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.815.695.507 dan Rp2.617.279.928.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh dikarenakan realisasi belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya yang cukup besar pada kegiatan baru yaitu Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi dan Pendampingan Program Strategis Kementan BRMP Kaltim. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.032.340.508,00	996.052.386,00	3,64
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.796.350,00	22.797.815,00	(0,01)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84.348.000,00	79.404.000,00	6,23
Beban Barang Operasional Lainnya	96.968.051,00	93.657.000,00	3,54
Beban Bahan	583.542.896,00	541.981.922,00	7,67
Beban Honor Output Kegiatan	-	12.300.000,00	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	588.615.050,00	628.943.030,00	(6,41)
Beban Langganan Listrik	191.064.314,00	212.767.671,00	(10,20)
Beban Langganan Telepon	379.127,00	2.069.234,00	(81,68)
Beban Langganan Air	15.957.211,00	16.509.180,00	(3,34)
Beban Jasa Profesi	-	4.800.000,00	(100,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	**2.815.695.507,00**	**2.617.279.928,00**	**7,58**

Beban Barang dan Jasa senilai Rp2.815.695.507,00 tidak sesuai dengan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.817.206.938,00 atau terdapat selisih senilai Rp1.511.431,00 karena adanya Jurnal Balik Akrual Tahun 2024 senilai Rp18.951.790,00 dan Jurnal penyesuaian Akrual Tahun 2025 senilai Rp19.378.649,00 serta adanya Revisi Akun SPM belanja keperluan perkantoran senilai Rp1.938.290,00)

Beban Pemeliharaan Rp517.982.160

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp517.982.160 dan Rp477.554.371.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,47 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh - Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.945.000,00	214.306.500,00	2,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.931.760,00	199.867.871,00	13,04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.630.400,00	63.380.000,00	(12,23)
Jumlah	**517.982.160,00**	**477.554.371,00**	**8,47**

Beban Perjalanan Dinas Rp646.964.471

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp646.964.471 dan Rp495.629.865

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 30,53 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	646.964.471,00	480.629.865,00	34,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	15.000.000,00	(100,00)
Jumlah	**646.964.471,00**	**495.629.865,00**	**30,53**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp268.285.000

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp268.285.000 dan Rp332.231.000

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,25 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehterdapat benih padi dan jagung hasil kegiatan perbenihan yang telah diserahkan ke petani dan dinas setempat telah dilengkapi dengan BAST benih antara kedua belah pihak. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	268.285.000	332.231.000,00	(19,25)
	-	-	-
Jumlah	**268.285.000,00**	**332.231.000**	**(19,25)**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.038.582.540

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.038.582.540 dan Rp1.116.053.797.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	547.162.933,00	624.634.198,00	(12,40)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.501.656,00	433.501.649,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.932.375,00	7.932.375,00	-
Beban Penyusutan Irigasi	46.839.749,00	46.839.749,00	-
Beban Penyusutan Jaringan	3.145.827,00	3.145.826,00	0,00
Jumah Penyusutan	***1.038.582.540,00***	***1.116.053.797,00***	***(6,94)***
Jumlah	**1.038.582.540,00**	**1.116.053.797,00**	**(6,94)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp-198.225

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-198.225 dan Rp198.225

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(198.225)	198.225	(200)
	-	-	-
Jumlah	**(198.225,00)**	**198.225**	**(200)**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp408.374.300

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp408.374.300 dan Rp463.365.000.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	318.300	82.365.000,00	(99,61)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	72.500.000,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	408.056.000	821.040.000,00	(50)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(512.540.000,00)	(100)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Jumlah	**408.374.300,00**	**463.365.000,00**	**(11,87)**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
0	-	-	-
0	-	-	-
0	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

D.16 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp66.524.096.085,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.66.524.096.085,00 dan Rp.67.134.511.146,00

Defisit LO Rp.9.663.830.063,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.9.663.830.063,00 dan Rp.9.541.546.102,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.150.000 dan Rp.-117.842.000 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp150.000,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.150.000,00 dan Rp.1.158.000,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	150.000
	-
Jumlah	**150.000**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-119.000.000. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp8.906.894.250

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8.906.894.250 dan Rp.9.048.973.041. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.269.833.323
Diterima dari Entitas Lain	(363.805.073)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	866.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
Jumlah	**8.906.894.250**

Ekuitas Akhir Rp65.767.310.272

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.65.767.310.272,00 dan Rp.66.524.096.085,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Bendahara Pengeluaran telah melaksanakan LPJ Pengeluaran pada tanggal 2 Januari 2026 dan Bendahara Penerimaan telah melaksakan LPJ Penerimaan pada tanggal 2 Januari 2026. Hasil Rekonsiliasi Sakti - SPAN satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur terbit dan sudah melakukan tutup buku periode Desember 2025.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menetapkan Dr. Akhmad Hamdan, SPt., MP sebagai Kepala BPSIP Kalimantan Timur dan Dhyani Nastiti Purwantiningdyah, S.P., M.P. sebagai Kepala Sub bagian Tata Usaha.

Berdasarkan SK No. 02/Kpts/KU.010/H.12.25/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 ditetapkan Dhyani Nastiti P, SP., MP sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
Berdasarkan SK No. 01/Kpts/KU.010/H.12.25/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 ditetapkan Bagus Indarto Setyawan, A.Md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan SK No. 03/Kpts/KU.010/H.12.25/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 menetapkan sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran	:	Sarhana, S.M
Bendahara Penerimaan	:	Nanda Satriadi, S.Ak.